



ILMU PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA

Pertemuan-10

OLEH :

Drs. Rasudyn Ginting, MSi

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA

Tujuan Instrusional Umum: Setelah mempelajari mata kuliah Ilmu Perbandingan Administrasi Negara mahasiswa dapat memahami latar belakang kelahiran studi perbandingan administrasi negara, tujuan perbandingan administrasi negara, pendekatan yang dapat dipergunakan dalam studi perbandingan administrasi negara, dan beberapa sistem administrasi negara yang ada

Tujuan Instrusional Khusus: Mahasiswa dapat, mengidentifikasi bentuk negara china, mengidentifikasi bentuk pemerintahan china, mengidentifikasi sistem pemerintahan china, mengidentifikasi infrastruktur politik yang mempengaruhi sistem administrasi negara china, menghubungkan beberapa faktor lain yang mempengaruhi sistem administrasi Negara, menggambarkan struktur organisasi pemerintahan menurut konstitusi 1975, menguraikan fungsi/tugas kongres rakyat nasional, menguraikan fungsi/tugas dewan Negara, menguraikan fungsi/tugas Supreme People's Court, menjelaskan hubungan kongres rakyat nasional-dewan negara-supreme people's court, menjelaskan hubungan pemerintah nasional dengan pemerintah daerah, menjelaskan hubungan antara modernisasi ekonomi (kapitalisasi) dengan sistem administrasi negara

SISTEM ADMINISTRASI NEGARA CHINA

↳ Bentuk Negara : Kesatuan

↳ Bentuk Pemerintahan : Republik Sosialis
Kediktatoran Proletariat (konstitusinal 1975)

↳ Sistem Pemerintahan : Parlementer

↳ Sistem Politik :

↳ ❖ **Infrastruktur Politik :**

↳ ➤ **Kun Chan Tang**

↳ ➤ **Political Figures**



❖ **Suprastruktur Politik:**

1. Legislatif

✓ **Kongres Rakyat Nasional**

✓ **Presidium Kongres Rakyat Nasional**

2. Eksekutif

Dewan Negara (perdana Menteri merangkap Ketua Dewan Negara, Wakil Perdana Menteri, Wakil Ketua Dewan Negara, Sekretaris Jendral, Kementrian, dan Panitia).



**Supreme State Conference
(Presidium Kongres Nasional, Ketua
Dewan Negara, dan lain-lain)**



3. Yudikatif



**Supreme People's Court yang
Membawahi People's Court**



Proses pemilihan pejabat negara dan mekanisme hubungan administratif



